

AKSESIBILITAS LEMBAGA PEMBIAYAAN FORMAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO PENGOLAHAN IKAN DI KABUPATEN GRESIK

Accessibility of Formal Financing Institution for Micro Business Actors of Fish Processing in the Gresik District

***Retno Widihastuti dan Hakim Miftakhul Huda**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 11 Juli 2019 Diterima setelah perbaikan: 13 Oktober 2019

Disetujui terbit: 25 November 2019

ABSTRAK

Kelompok usaha mikro merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini masih menemukan kesulitan dalam mengakses pinjaman dari lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan formal khususnya masih memegang ketentuan yang belum mampu mereka jangkau. Namun tidak demikian bagi kelompok usaha di desa yang sebagian besar adalah menekuni bidang perikanan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2018 bertujuan untuk: a) mendeskripsikan karakteristik usaha mikro pengolahan ikan; b) menganalisis kendala dan tantangan akses permodalan formal yang sesuai kebutuhan usaha, serta; c) menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan pembiayaan formal ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan kunci (*key person*) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, ketua kelompok usaha mikro, serta petugas lembaga pembiayaan formal. Data dianalisis secara deskriptif, dengan menggambarkan kinerja usaha pengolahan mikro dan pola pembiayaan lembaga formal yang dapat diakses oleh kelompok usaha mikro di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja usaha pengolahan mikro layak dikembangkan. Pelaku usaha khususnya pada pengolahan ikan, telah menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan formal yang menjembatani usaha mereka. Sebagai opsi rekomendasi mengenai pola pembiayaan yang memudahkan bagi debitur, maupun lembaga pembiayaan itu sendiri adalah lembaga pembiayaan formal yang menawarkan kemudahan sebagai berikut: a) tidak mensyaratkan calon peminjam modal usaha dengan sebuah jaminan; b) lembaga pembiayaan memberikan edukasi berupa pelatihan tata cara pengelolaan dana usaha. Petugas lembaga pembiayaan formal dapat memantau sekaligus memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur dengan harapan akan mengurangi masalah kredit macet bagi hasil atau istilah bunga pinjaman paling besar adalah sesuai standar Bank Indonesia.

Kata Kunci: aksesibilitas; formal; informal; pengolahan; pembiayaan mikro

ABSTRACT

Micro business groups are part of the Indonesian community, which until now still finds it difficult to access loans from financial institutions. Formal financial institutions in particular still hold provisions that they have not been able to reach. However, this is not the case for business groups in the village, most of which are engaged in fisheries in Gumeng Village, Bungah sub district of Gresik District. Research conducted in April 2018 was aimed at finding out the accessibility of financing patterns by the Gresik District : a) describing the characteristics of fish processing micro businesses; b) analyze the constraints and challenges of formal capital access in order to obtain the availability and access to capital according to business needs; and c) analyze access to capital according to business needs, performance, and institutional perspective of formal financing going forward. The research method used is qualitative by conducting in-depth interviews (key interviews) to key informants (key person), namely the Department of Marine and Fisheries, the head of the micro business group, and officials of formal financial institutions. Analysis of data used descriptively, illustrating the financing patterns of formal institutions that can be accessed by small business groups in Gumeng Village, Bungah Sub District, Gresik District. From the results of these studies, businesses, especially in fish processing, have collaborated with of formal financing institutions that bridge their businesses. As a recommendation option regarding the pattern of

financing that makes it easy for debtors, as well as financial institutions themselves, is a formal financial institution that offers convenience as follows: a) does not require prospective business capital borrowers with a guarantee; b) financial institutions provide education in the form of training in procedures for managing business funds. Officials of the formal finance institution can monitor and provide input on the business patterns of the debtor. Thus, it will reduce the problem of bad credit. Whereas for the debtor, it can develop the business according to the procedures for proper business management and development; and c) the largest loan interest rates are in accordance with Bank Indonesia standards.

Keywords: *accessibility; formal; informal; processing; micro financing*

PENDAHULUAN

Pelaku usaha perikanan di Indonesia, saat ini masih didominasi oleh pelaku usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (UU Nomor 20 Tahun 2008). Usaha perikanan mikro kerap dihadapkan pada masalah pembiayaan, karena pada umumnya tidak mempunyai kemampuan finansial yang mencukupi untuk meningkatkan skala investasi dan biaya operasional, disamping itu juga tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk mencari kredit usaha. Usaha mikro menjadi golongan jenis usaha marginal yang ditunjukkan dengan tingkat modal dan akses terhadap kredit yang rendah (Dewanti, 2010). Salah satu pelaku usaha yang masih mendominasi usaha skala mikro adalah usaha pengolahan hasil perikanan. Usaha pengolahan hasil perikanan menjadi sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bisang usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya atau akuakultur. Disamping itu kegiatan usaha ini bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ini ke pasar dengan harapan diterima oleh konsumen yang lebih luas (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2006).

Berdasarkan penelitian BPS bekerjasama dengan Kementerian Negara KUKM tahun 2003, bahwa disebutkan sebesar 51,09% UMKM mengalami kesulitan dalam permodalan, dan sebesar 82,5% mengatasi permasalahan permodalan dengan tidak meminjam ke bank (Winarni, 2006). Menurut data makro perkembangan kredit mikro menunjukkan positif, namun ternyata UMKM hanya terdiri dari sebagian kecil saja atau 16,22% pada tahun 2011 dan menurun menjadi 15,25% pada tahun 2013 (Darwin, 2018). Pada sub sektor khususnya perikanan tangkap, lembaga perbankan pada umumnya kurang berminat menyalurkan kreditnya (Masyuri, 2014).

Hal demikian memunculkan adanya keterikatan pelaku usaha mikro dengan bakul atau lembaga pembiayaan informal. Ketika pelaku usaha mikro dihadapkan pada permasalahan modal, mereka cenderung menginginkan mencari peminjam yang dapat mengucurkan pinjaman secara cepat (Elisa *et al.*, 2017).

Disamping itu, Wardono, Fauzi, Fahrudin & Purnomo (2015) berpendapat bahwa ketergantungan terhadap pemodal terjadi sejak nelayan mulai menanamkan modalnya untuk usaha perikanan, selain investasi awal, interaksi nelayan dengan pemodal kecenderungannya dipengaruhi oleh jenis sumber daya yaitu pelagis kecil dan pelagis besar. Pemilik modal yang juga sebagai pedagang perantara memberikan pinjaman kepada pengolah hasil perikanan telah menjadi penguasa ekonomi di desa-desa, dan dapat dikatakan sebagai pihak yang paling beruntung (Ambaraini, Sofyan & Satmaidi, 2018).

Menanggapi permasalahan di atas, pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Pada bidang perikanan, sejak tahun 2015, pemerintah telah membuat program antara lain untuk mendorong pembiayaan UKM perikanan. Pemerintah memperluas upayanya dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Industri Perbankan serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan cara memperluas program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*). Hal tersebut ditujukan agar pelaku usaha perikanan dapat memiliki akses pada bidang keuangan untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor usahanya (KKP, 2016). Namun sampai dengan saat ini, program tersebut belum berjalan optimal. Kendala yang ditemui oleh calon debitur adalah adanya stereotipe terhadap peminjam dari sektor perikanan. Para analis perbankan sebagai lembaga keuangan yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro kelautan perikanan. Memandang bahwa calon debitur yang memiliki latar belakang pelaku usaha perikanan belum memiliki kemampuan

manajerial keuangan usaha yang baik sehingga dikhawatirkan adanya kemacetan dalam meminjam. Pada kenyataannya program keuangan mikro perikanan ini masih tetap berjalan, sedangkan program pengembangan keuangan mikro dari program-program pengembangan keuangan mikro yang dilaksanakan beberapa instansi pemerintah ada yang berhenti (Darwin, 2017 dalam Saptia *et al.*, 2017). Meskipun program tersebut ditujukan untuk menunjang pembiayaan untuk rakyat miskin dan UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan kondisi masih rendahnya realisasi kredit perbankan di sektor perikanan, khususnya pada bidang pengolahan. Para pelaku perikanan mikro menemui kesulitan untuk mengakses sumber modal dari lembaga formal tersebut. Karena ketika dilakukan pemberkasan administrasi, lembaga perbankan menjadi motor yang menggerakkan masyarakat didalamnya.

Oleh karenanya, ketika pelaku perikanan mikro diminta untuk menyajikan persyaratan yang dituntut oleh lembaga pembiayaan formal tersebut, hal tersebut belum dapat dipenuhi. Keterbatasan pelaku usaha mikro dalam mengakses lembaga pembiayaan antara lain adalah aspek legalitas usaha yang menjadi salah satu tuntutan lembaga pembiayaan (Risnawati, 2018). Hambatan tersebut mendorong pelaku usaha mikro kembali mempercayakan bakul sebagai sumber penyedia modal yang mudah diperoleh. Bakul sebagai lembaga informal dianggap lebih cepat, dan efektif (Winanto *et al.*, 2014). Lembaga informal ini menjadi solusi bagi pelaku usaha ketika dihadapkan pada permasalahan kesulitan meminjam pada lembaga formal.

Permasalahan tersebut menjadi dorongan mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu mengenai pola pembiayaan yang dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan mikro. Aksesibilitas permodalan pelaku usaha kecil terhadap lembaga pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha mikro adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan usaha dari pelaku usaha mikro itu sendiri, baik mengenai persyaratan, maupun kesanggupan pembayaran secara rutin. Penelitian memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

- a. Mendeskripsikan karakteristik usaha mikro pengolahan ikan;
- b. Menganalisis kendala dan tantangan akses permodalan formal sehingga diperoleh kesediaan dan akses permodalan sesuai kebutuhan usaha; serta

- c. Menganalisis akses permodalan sesuai kebutuhan usaha, kinerja, dan perspektif kelembagaan pembiayaan formal ke depan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka menjawab tujuan penelitian selanjutnya disusun opsi rekomendasi yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pada program pengentasan masalah permodalan usaha pengolahan skala mikro.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pada bulan April 2018. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi yang didominasi oleh pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro perikanan.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (2014) bahwa metode deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran/koleksi data instansi seperti dinas kelautan dan perikanan perbankan, serta Otoritas Jaminan Keuangan (OJK). Pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan inti yang merupakan ketua kelompok, bendahara, dan anggota dari kelompok pelaku usaha pengolah ikan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 2006). Menurut Mulyana (2010), wawancara mendalam merupakan wawancara yang tidak terstruktur dengan susunan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara ini mirip dengan percakapan informal dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil wawancara diubah dalam bentuk catatan sebagai data primer yang kemudian dipetakan berdasarkan topik permasalahan (BBRSEKP, 2015).

Metode Analisis Data

Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2017) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu hasil pengamatan atau penelitian (Damayanti, 2011). Metode analisis data secara deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja usaha pengolahan ikan skala mikro dengan mendeskripsikan biaya investasi, biaya operasional, serta penerimaan usaha per siklus usaha pengolahan ikan berupa pengasinan ikan dan kerupuk ikan. Analisis deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan pola pembiayaan formal yang mampu diakses oleh pelaku usaha mikro khususnya bidang pengolahan hasil perikanan. Analisis deskriptif ini menggambarkan model pembiayaan yang sudah diimplementasikan oleh pelaku usaha mikro bidang perikanan di Kabupaten Gresik. Analisis data ini ditujukan untuk mengetahui, dan juga pola pembiayaan usaha lembaga formal yang mampu diakses oleh pelaku usaha kecil di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik yang menekuni bidang pengolahan, sebagian besar adalah usaha yang diperoleh secara turun temurun. Secara umum, potensi dasar yang dimiliki masyarakat perikanan diperoleh dari kegiatan yang dilakukan secara turun temurun (Wiyono & Mustaruddin, 2016). Setelah melakukan pendidikan setingkat menengah atas, pelaku

usaha lebih memilih untuk melanjutkan atau mengembangkan usaha orangtuanya. Dengan modal pendidikan yang dimiliki, mereka merasa memiliki keberanian untuk melakukan usaha yang sama dengan orangtuanya. Ilmu yang diperoleh selama pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, akan membantu seseorang untuk mengambil keputusan melakukan usaha (Neeley, L & Auken, H.V. (2010) dalam Caroline). Untuk melakukan pekerjaan tersebut, mereka cenderung tidak menemui kesulitan, karena sudah terbiasa membantu orangtua untuk menjalankan usahanya. Faktor pekerjaan orangtua, pengalaman, kesertaan dalam pendidikan non formal yang relevan, serta interaksi komunikasi sosial berhubungan dengan preferensi pemilihan aktivitas masa depan (Aprilinda & Muksin, 2015). Dalam menjalankan usahanya, mereka lebih memilih usaha sendiri daripada membentuk kelompok.

Usaha pengolahan yang dijalankan masyarakat di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, adalah pembuatan ikan asin dan kerupuk berbahan baku ikan. Pelaku usaha membuat ikan asin dengan bahan baku ikan pesut, indo, glomo, serta semeru. Bahan baku diperoleh dari Desa Tanjung Sedayu. Sedangkan bahan yang diperlukan untuk pembuatan kerupuk ikan adalah tepung tapioka, ikan kupas, serta bumbu pendukung. Ketika mengawali usaha tersebut, pelaku usaha menemui beberapa kendala dan tantangan.

Tabel 1. Biaya Investasi Usaha Pengolahan Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Table 1. Investment Cost of Fish Processing Bussiness in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.

Uraian/Description	Satuan/Unit	Olahan Ikan/Processed Fish	
		Pengasinan/Salting	Kerupuk Ikan/Fish Crackers
Investasi/Investation	Rp/IDR	9,214,000	25,000,000
Siklus produksi per tahun/Production cycle per year	Kali/Tahun/Times/Year	240	276
Per siklus/Per cycle			
Biaya Tetap/Fixed Cost	Rp/siklus/IDR/Cycle	32,567	50,226
Biaya Variabel/Variable Cost	Rp/siklus/IDR/Cycle	634,900	1,298,000
Produksi/Production	Kg/siklus/Kg/Cycle	42	100
Penerimaan/Income	Rp/siklus/IDR/Cycle	841,500	1,700,000
Keuntungan Usaha/Business Profits	Rp/siklus/IDR/Cycle	174,033	351,774
Per tahun/ Per Year			
Biaya Tetap/ Fixed Cost	Rp/tahun/IDR/Year	7,816,000	13,862,500
Biaya Variabel/ Variable Cost	Rp/tahun/IDR/Year	152,376,000	358,248,000
Produksi/ Production	Kg/tahun/IDR/Year	10,080	27,600
Penerimaan/Income	Rp/tahun/IDR/Year	201,960,000	469,200,000
Keuntungan Usaha/Business Profit	Rp/Tahun/IDR/Year	41,768,000	97,089,500

Pelaku usaha dihadapkan pada kendala belum memiliki ketersediaan modal yang cukup, sehingga harus mencari modal dari lembaga pembiayaan yang tentunya dihadapkan oleh tantangan agar mampu membayar dari hasil usahanya. Pelaku usaha menentukan lembaga informal sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan kemudahan dalam meminjamkan modal. Lembaga informal tersebut istilahnya adalah bakul atau orang yang akan meminjamkan modal usaha kepada pelaku usaha pengolahan. Sistem yang diterapkan oleh lembaga informal bervariasi, yaitu dengan dibayar meminjamkan uang dan dibayar menggunakan hasil pengolahannya, adapula dengan memberikan modal bahan baku yang tentunya menggunakan harga yang lebih tinggi.

Sebelum mampu mengakses lembaga pembiayaan formal, pelaku usaha mendapatkan modal usaha mendapatkan pinjaman bahan baku dari bakul. Keberadaan bakul memberikan kemudahan akses permodalan meskipun harga yang diperoleh menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan membeli langsung ke toko kelontong. Tabel 2 menunjukkan keragaan analisis usaha ikan asin dan kerupuk ikan per siklus produksi dan per tahun.

Investasi usaha pengolahan ikan untuk usaha pengasinan ikan di Kecamatan Bungah membutuhkan biaya sebesar Rp.9.214.000; sedangkan untuk usaha kerupuk ikan memerlukan biaya investasi usaha sebesar Rp.25.000.000. Dalam satu hari usaha pengasinan ikan rata-rata menghasilkan produksi 42 kg ikan asin, sedangkan kerupuk ikan menghasilkan produksi 100 kg per hari. Berdasarkan nilai penjualan produksi olahan ikan

diperoleh nilai Rp.841.500 per siklus produksi untuk ikan asin dan Rp.1.298.000 per siklus produksi untuk kerupuk ikan. Keuntungan usaha per siklus produksi mencapai Rp.174.033 untuk usaha pengasinan ikan dan Rp.351.774 untuk kerupuk ikan. Dalam satu tahun terdapat 240 kali siklus produksi pengasinan ikan dan 276 kali siklus produksi kerupuk ikan. Keuntungan usaha pengasinan ikan dalam setahun mencapai Rp.41.768.000, sedangkan keuntungan usaha kerupuk ikan mencapai Rp.97.089.500 per tahun. Keragaan biaya investasi, biaya operasional dan penerimaan usaha secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 7.

Usaha kerupuk ikan memerlukan peralatan seperti mesin pengaduk bahan baku, mesin pemotong kerupuk, pengukus dan beberapa peralatan yang lain. Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa komponen investasi usaha yang paling besar adalah untuk pengadaan lahan dan bangunan untuk usaha pengolahan perikanan (Tabel 3).

Usaha pengasinan ikan tidak memerlukan barang investasi yang banyak. Perlengkapan yang diperlukan dalam usaha pengasinan ikan diantaranya adalah para-para, pisau, timba, tempat ikan, timbangan dan lokasi usaha. Komponen investasi yang paling besar adalah penyediaan lahan untuk usaha selanjutnya adalah tempat penampungan ikan sebagai bahan baku. Para-para digunakan sebagai media penjemuran ikan yang diasinkan. Dalam satu para-para biasanya mampu menampung 3 kilogram bahan baku ikan asin (Tabel 4).

Tabel 2. Investasi Usaha Kerupuk Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.
Table 2. Investment of Fish Cracker Business in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.

No.	Investasi/ Investation	Satuan/ Unit	Jumlah/ Amount	Harga Satuan (Rp)/ Unit Price (IDR)	Nilai (Rp)/ Value (IDR)	(%)
1	Mesin pengaduk/Mixer	Unit/Unit	1	6,000,000	6,000,000	24
2	Mesin pemotong/Cutter	Unit/Unit	4	300,000	1,200,000	5
3	Pengukus (langseng)/Steaming	Unit/Unit	10	200,000	2,000,000	8
4	tTempat ikan/Fish place	Unit/Unit	1	500,000	500,000	2
5	Kompor/Stove	Unit/Unit	6	450,000	2,700,000	11
6	Tabung gas/Gas cylinder	Unit/Unit	5	120,000	600,000	2
7	Para-para/Para-para	Unit/Unit	100	10,000	1,000,000	4
8	Alat pengemasan/Packaging	Unit/Unit	1	400,000	400,000	2
9	Timbangan/Scales	Unit/Unit	2	300,000	600,000	2
10	Sewa lahan dan bangunan/ Land & buildings	per tahun/ Per year	1	10,000,000	10,000,000	40
Jumlah/Total					25,000,000	100

Tabel 3. Investasi Usaha Pengasinan Ikan di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.
Table 3. Investment in Fish Salting Business business in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.

No.	Investasi/ Investation	Satuan/ Unit	Jumlah/ Amount	Harga Satuan (Rp)/ Unit Price (IDR)	Nilai (Rp)/ Value (IDR)	(%)
1	Para-para/Para-para	Unit/Unit	70	10,000	700,000	8
2	Pisau/Knife	Unit/Unit	22	7,000	154,000	2
3	Timba/Bucket	Unit/Unit	12	5,000	60,000	1
4	Tempat ikan/Fish place	Unit/Unit	4	500,000	2,000,000	22
5	Timbangan/Scales	Unit/Unit	1	300,000	300,000	3
6	Sewa lahan dan bangunan/Land & building	Unit/Unit	1	6,000,000	6,000,000	65
Jumlah/Total					9,214,000	100

Tabel 4. Biaya Operasional Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.

Table 4. Operational Cost of Fish Cracker Businesses Per Production Cycle cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik Regency, 2018 .

No	Jenis Biaya/Type of Fee	Satuan/ Unit	Jumlah/ Amount	Harga satuan (Rp)/ Unit Price (IDR)	Nilai (Rp)/ Value (IDR)
1	Bahan baku utama/Main raw material				
	Tepung tapioca/Tapioca flour	Kg/Kg	100	8,500	850,000
	Ikan kupas/Peeled fish	Kg/Kg	12	11,000	132,000
2	Bahan pendukung/Supporting material				
	Bawang/Onion	Kg/Kg	2	19,000	38,000
	Penyedap/Flavor	Kg/Kg	2	22,500	45,000
	Plastik/Plastic	Biji/Pc	20	500	10,000
	Garam/Salt	Kg/Kg	2	4,000	8,000
3	Upah tenaga kerja/Labor wages				
	Pemotong/Cutter	Per Kg/Per Kg	100	800	80,000
	Penjemur/Dryer	Per Kg/Per Kg	100	500	50,000
	Pengemas/Packaging	Per Kg/Per Kg	100	100	10,000
	Produksi/Production	Per Kg/Per Kg	100	500	50,000
4	listrik dan LPG/Electricity & LPG		1	25,000	25,000
Jumlah/Total					1,298,000

Kebutuhan bahan baku utama usaha kerupuk ikan adalah tepung tapioka dan ikan. Harga kerupuk ikan dipengaruhi oleh tingkat kandungan ikan dalam kerupuk. Semakin tinggi kandungan ikan dalam kerupuk ikan maka harga produk kerupuk ikannya akan semakin tinggi. Usaha kerupuk ikan dengan kapasitas produksi

100 kg per hari dapat dikerjakan oleh 4 orang tenaga kerja dengan pembayaran upah berdasarkan produk kerupuk ikan yang dihasilkan. Saat ini biaya tepung tapioka relatif tinggi sehingga mengurangi keuntungan usaha karena pelaku usaha sulit untuk menaikkan harga produk kerupuk ikan yang dihasilkan (Tabel 5).

Tabel 5. Biaya Operasional Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.

Table 5. Operational Cost of Salting Fish Per Production Cycle cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.

No	Jenis Biaya/Type of Fee	Satuan/ Unit	Jumlah/ Amount	Harga Satuan (Rp)/ Unit Price (IDR)	Nilai (Rp)/ Value (IDR)
1	Bahan baku/Raw Material				
	Ikan glomo/Glomo fish	Kg	50	4,000	200,000
	Ikan indo/Indo fish	Kg	50	3,500	175,000
	Ikan pecut/Pecut fish	Kg	10	6,000	60,000
	Ikan smeru/Smeru fish	Kg	10	6,000	60,000
2	Bahan pendukung/Supporting material				
	Garam/Salt	Kg	7	3,700	25,900
	Es/Ice	Kg	10	1,000	10,000
	Kardus/Cardboard	Biji	2	2,000	4,000
3	Tenaga kerja/ Labor				
	Upah tenaga kerja/Labor wages	Orang/ Hari/ Person/ Day	2	50,000	100,000
Jumlah/Total					634,900

Tabel 6. Penerimaan Rata-Rata Usaha Ikan Asin Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.

Table 6. Acceptance of Salted Fish Per Production Cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.

No	Jenis Ikan/Type of Fish	Satuan/Unit	Jumlah/Amount	Harga Satuan (Rp)/Unit Price (IDR)	Nilai (Rp)/Value (IDR)
1	Ikan glomo/Glomo fish	Kg/Kg	25	15,000	375,000
2	Ikan indo/Indo fish	Kg/Kg	12.5	25,000	312,500
3	Ikan pecut/Pecut fish	Kg/Kg	2.2	35,000	77,000
4	Ikan smeru/Smeru fish	Kg/kg	2.2	35,000	77,000
Jumlah/Total			42		841,500

Usaha pengasinan ikan tidak memerlukan bahan pendukung yang bermacam-macam, bahan pendukung yang digunakan hanya berupa garam sebagai bahan pengawet dan es sebagai media penyimpanan bahan baku sebelum diolah lebih lanjut. Usaha pengasinan ikan sangat bergantung dengan panas matahari, sehingga ketika intensitas matahari berkurang menyebabkan turunnya produktivitas usaha. Dari hasil usaha tersebut diperoleh penerimaan dapat dilihat pada Tabel 6.

Dalam satu siklus produksi pengasinan ikan biasanya dalam waktu satu hari mampu menghasilkan produksi ikan asin sebanyak 42 kg dengan nilai sebesar Rp.841.500.

Pada produksi kerupuk ikan yang dihasilkan bisa mencapai 100 kilogram per siklus produksi dengan nilai produksi mencapai Rp.1.700.000. Produk hasil olahan ikan dijual keluar daerah seperti Surabaya, Tuban, Lamongan, dan daerah lain di Jawa Timur baik secara langsung maupun melalui pedagang pengumpul. Sebelum dijual ke pasar luar Kabupaten Gresik, pelaku usaha yang telah meminjam modal kepada lembaga informal akan menjual produk yang dihasilkan kepada lembaga informal dengan harga yang telah disepakati. Kemudahan yang diperoleh para pelaku usaha kecil dengan meminjam pada lembaga informal tersebut adalah adanya syarat yang tidak terlalu memberatkan, cepat mendapatkannya, dan dapat dibayar setelah memperoleh hasil

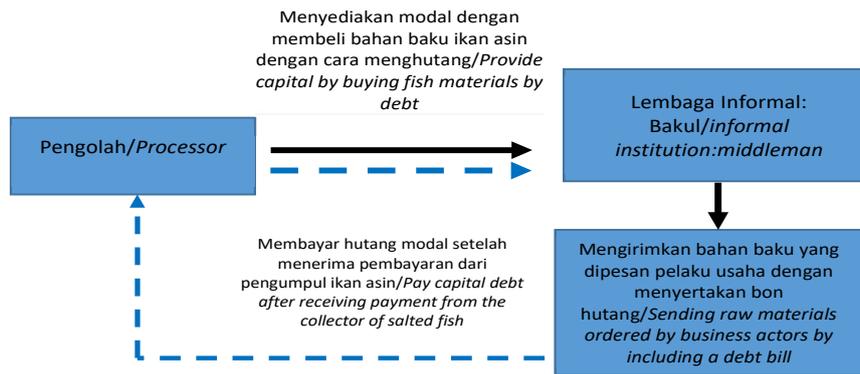
penjualannya. Namun, pelaku usaha cenderung tidak memperlumahkan dengan harga bahan baku yang lebih tinggi, daripada jika dengan membeli langsung dan bayar tunai. Bagi mereka, dengan semakin seringnya melakukan produksi, maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, dan tidak mengecewakan pelanggan. Meskipun keuntungan yang diperoleh lebih kecil, namun jika frekuensi produksi dan penjualannya tinggi, maka keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, pelaku usaha belum menyadari bahwa kendala yang dihadapi adalah kerugian, serta belum memikirkan mengenai cara dalam mengembangkan usahanya. Mereka cenderung mencari kemudahan usahanya dapat berjalan bukan untuk mengembangkan.

Untuk menganalisis akses permodalan dapat digunakan model pembiayaan lembaga informal dan formal. Dari alur model pembiayaan lembaga informal yang diikuti pelaku usaha mikro di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik diawali dengan bakul atau pengumpul yang memberikan pinjaman modal bahan baku kepada pelaku usaha mikro. Bahan baku dikirimkan kepada pelaku usaha, ketika akan melakukan produksi. Sedangkan untuk pembayaran ke bakul dilakukan setelah pelaku usaha menerima pembayaran dari konsumen. Jika dibandingkan dengan membeli langsung, selisih harga mencapai 7% lebih besar dari harga jual tunai.

Tabel 7. Penerimaan Rata-Rata Usaha Kerupuk Ikan Per Siklus Produksi di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, 2018.

Table 7. Acceptance of Salted Fish Per Production Cycle cycle in Gumeng Village, Bungah Sub District of Gresik District, 2018.

No	Jenis Ikan/Type of Fish	Satuan/Unit	Jumlah/Amount	Harga satuan (Rp)/Unit Price (IDR)	Nilai (Rp)/Value (IDR)
1	Kerupuk ikan/Fish Cracker	Kg/Kg	100	17,000	1,700,000
Jumlah/Total			100		1,700,000



Gambar 1. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Informal di Kabupaten Gresik 2018.
Figure 1. Financing Model of Informal Financing Institutions in Gresik District, 2018.

Kondisi pada Gambar 1 telah dilalui oleh pelaku usaha mikro di Desa Gumeng sampai dengan dua tahun yang lalu. Pola pembiayaan yang diikuti dari lembaga informal menjadi pilihan mudah bagi pelaku usaha mikro. Namun hal tersebut menjadi pertimbangan kembali bagi mereka, ketika ada petugas dari lembaga pembiayaan formal yaitu salah satu bank syariah memberikan solusi pinjaman dana usaha. Para pelaku usaha mikro semakin terbuka dengan keberadaan bank syariah tersebut. Pendekatan bank syariah terhadap masyarakat dimulai dari penawaran pinjaman untuk usaha, pemberian edukasi mengenai manajemen keuangan pada usaha, serta pentingnya pembentukan sebuah kelembagaan berupa kelompok. Seperti pendapat dari Arsyad (2015), bahwa jaringan sosial menjadi salah satu modal (*social capital*) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat. Karakteristik usaha perikanan yang banyak resiko dan ketidakpastian membutuhkan lembaga pembiayaan yang lebih fleksibel (Sutawi, 2008). Program ini menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat melalui perbankan dapat mewujudkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial dan masyarakat (Suharto, 2009). Beberapa pertimbangan yang menjadikan pelaku usaha mikro di Desa Gumeng memilih bank syariah sebagai lembaga peminjam modal usaha adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah memberikan modal usaha berbentuk uang tunai;

Pelaku usaha mikro di Desa Gumeng dapat mengelola uang tunai untuk rencana pengelolaan usaha. Secara bertahap, kondisi ini memungkinkan pelaku usaha dapat mengembangkan usaha tanpa dijerat harga

tinggi oleh penjual bahan baku ikan asin. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh pelaku usaha sebagai modal pengembangan usaha di dalamnya.

- b. Bagi hasil atau nisbah yang ditentukan bank syariah sesuai dengan kemampuan dari pelaku usaha mikro. Dana pinjaman yang diterima oleh pelaku usaha mikro pada tahun pertama adalah 2 juta dalam jangka waktu satu tahun. Bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 9% pertahun. Dengan kondisi ini, pelaku usaha mampu menyimpan keuntungan untuk membayar nisbah dan mengembangkan usaha.
- c. Debitur atau peminjam modal tidak perlu menyediakan jaminan pinjaman;

Syarat yang paling menyulitkan bagi pelaku usaha adalah menyediakan jaminan modal. Melalui bank syariah ini, pelaku usaha tidak perlu menyediakan jaminan modal berupa sertifikat rumah. Untuk dapat menjadi debitur, pelaku usaha wajib membuat kelompok dengan jumlah minimal sepuluh orang. Seluruh tanggung jawab ditanggung renteng oleh seluruh anggota dalam kelompok.

- d. Debitur mendapatkan pelatihan mengenai cara pengelolaan modal usaha;

Kesulitan yang ditemui oleh pelaku usaha mikro adalah cara mengelola usaha dengan tepat. Melalui pelatihan yang diperoleh dari petugas Bank Syariah, pelaku usaha dapat belajar cara mengelola keuangan untuk usaha dengan waktu setiap sebulan 2 kali. Ketika pelatihan tersebut berlangsung, petugas juga dapat memberikan masukan mengenai proses mengelola usaha yang

sedang berlangsung, sehingga memberikan peluang untuk mengurangi permasalahan dari pelaku usaha.

e. Pembayaran dilakukan sebulan dua kali.

Pembayaran yang dilakukan dengan tahapan sebulan dua kali, akan memudahkan pelaku usaha mikro. Hal ini mendorong pelaku usaha mikro untuk mengumpulkan uang pembayaran setiap hari, dan tidak mengurangi peluang untuk membelanjakan yang bersifat konsumtif.

Analisis modal lembaga pembiayaan formal yang diikuti oleh pelaku usaha mikro di Desa Gumeng, Kabupaten Gresik digambarkan pada model pembiayaan Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN) Syariah di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 2.

Model pembiayaan bank syariah di Kabupaten Gresik menggambarkan alur bahwa dalam memberlakukan pembayaran sebulan dua kali. Petugas mendatangi langsung kepada anggota kelompok usaha yang telah berkumpul di rumah ketua kelompok. Jika ada anggota yang terlambat membayar, maka kelompok bertanggung jawab secara tanggung renteng atau memikul beban

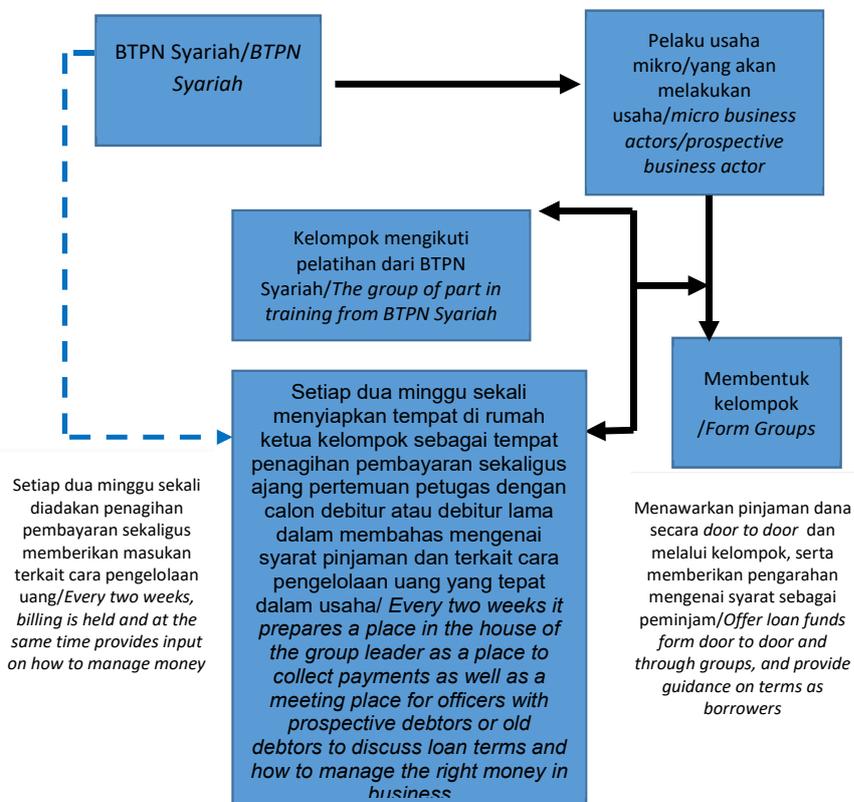
bersama. Ketika melakukan penagihan tersebut, petugas juga memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan pembinaan mengenai syarat pinjaman serta tata cara pengelolaan dana yang tepat untuk usaha, kepada calon debitur maupun debitur lama yang tergabung dalam kelompok pelaku usaha tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Usaha pengolahan ikan pengasinan dan kerupuk ikan skala mikro mempunyai kinerja usaha yang layak untuk dikembangkan. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha saat ini adalah keterbatasan modal usaha karena masih minimnya informasi akses pembiayaan modal usaha yang murah.

Realisasi kredit perbankan Indonesia pada sektor perikanan dapat didongkrak dengan adanya kemudahan akses perbankan yang dijangkau pelaku usaha perikanan mikro. Hal tersebut menunjukkan diperlukannya jaringan sosial antara individu dan kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan sama. Kemudahan akses tersebut



Gambar 2. Model Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Formal di Kabupaten Gresik, 2018.
 Figure 2. Financing Model of Formal Financing Institutions in Gresik District, 2018.

dibutuhkan pola pembiayaan yang berpihak pada pelaku usaha perikanan mikro sebagai debitur.

Kemudahan pelaku usaha atau calon debitur diperoleh dari lembaga pembiayaan formal yang tidak menuntut jaminan pinjaman kepada debitur. Pelaku usaha perikanan mikro tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyajikan jaminan, oleh karenanya jika tidak dituntut jaminan pinjaman, maka pelaku usaha perikanan mikro dapat memperoleh kemudahan meminjam pada lembaga pembiayaan formal.

Lembaga pembiayaan yang dibutuhkan pelaku usaha juga lembaga pembiayaan yang menerapkan proses pencairan dana yang tidak lama. Usaha perikanan mikro dijalankan oleh pelaku sesuai dengan kebutuhan konsumen atau sistem pesanan. Frekuensi produksi dalam sebulan dilakukan antara 2-5 kali, bahkan lebih. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan produksi diperlukan modal yang tersedia sebelum produksi. Hal ini untuk menghindari harga bahan baku tinggi dari para bakul.

Fasilitas lain dari lembaga pembiayaan formal yang diperlukan debitur adalah memberikan pelatihan mengenai tata cara pengelolaan usaha secara simultan kepada debitur. Pelatihan tatacara pengelolaan dana usaha yang diberikan akan menguntungkan kedua pihak, dalam hal ini adalah pelaku usaha perikanan mikro sebagai debitur dan lembaga pembiayaan formal. Petugas lembaga pembiayaan formal dapat memantau sekaligus memberi masukan pada pola usaha yang dilakukan debitur. Dengan demikian akan mengurangi masalah kredit macet. Bagi debitur, pelaku usaha perikanan mikro juga dapat mengembangkan usaha sesuai dengan tata cara pengelolaan usaha dan pengembangan usaha yang tepat. Disamping itu calon debitur membutuhkan lembaga pembiayaan formal yang tidak mengenakan bunga pinjaman yang terlalu besar dari standar Bank Indonesia (BI). Bunga pinjaman sesuai standar, menjadikan debitur dapat mengelola keuntungan baik untuk pembayaran hutang, pengembangan usaha, dan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup.

Rekomendasi Kebijakan

Kelayakan usaha pengolahan ikan skala mikro perlu didukung dengan kemudahan akses pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan modal usaha sehingga skala usaha yang dilakukan menjadi lebih meningkat.

Program pembiayaan pada pelaku usaha pengolah hasil perikanan skala mikro yang disampaikan oleh pemerintah sebaiknya memperhatikan opsi-opsi yang meliputi: a) Program pembiayaan pada pelaku usaha perikanan mikro yang sesuai dengan kemampuan dari pelaku usaha perikanan mikro. Kemampuan tersebut diukur dengan syarat yang tidak menyertakan penyediaan jaminan pinjaman, serta kemampuan membayar pinjaman modal usaha secara rutin. Untuk pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro, sangat kecil kemampuan menyajikan jaminan pinjaman. Perhitungan pemberian modal juga disesuaikan dengan jenis usaha dan hasil penjualan secara rata-rata; b) Program pembiayaan pemerintah pada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro memerlukan tambahan pelatihan tata cara pengelolaan dana usaha, serta; c) Program pembiayaan pemerintah menggunakan bunga pinjaman paling tinggi adalah sesuai standar dari Bank Indonesia.

Selanjutnya pola pembiayaan yang mudah diakses para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dapat menjadi *template* model pembiayaan usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro pada jenis usaha lainnya. Diharapkan dengan adanya program bantuan pembiayaan pada skala mikro yang memperhatikan hal-hal di atas, akan tercapai peningkatan usaha dan kesejahteraan pada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro, serta meningkatnya realisasi kredit perbankan pada sektor perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc sebagai plit Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), serta tim riset model pembiayaan usaha dan pemasaran produk pengolahan hasil perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambaraini, N.S.B. Sofyan, T. & Satmaidi, E. (2018). Hubungan Hukum Pedagang Perantara dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 743-762. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1801/1506>.

- Aprilinda, Y. & Muksin. (2015) dalam Muksin. (2016). Faktor-Faktor yang berhubungan dengan perilaku berwirausaha Santri dalam aktivitas Perkoperasian pada Pesantren di Kabupaten Jember. Polije. Development Needs of Entrepreneurial Interest in Youth. *Prosiding Seminar Nasional*. ISBN 978-602-60569-2-4, 852-862. Diakses dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php>prosiding>article>download>.
- Arsyad, I. (2015). *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- BBRSEKP. (2015). *Lembaga Permodalan Informal Pada Masyarakat Nelayan*. Jakarta. Laporan Teknis.
- Damayanti, A.S. (2011). *Pola Konektivitas Sistem Sosial Ekologi Dalam Pengelolaan Ekosistem Lamun (Kajian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Padang Lamun di Desa Malang Rapat dan Desa Teluk Bakau, Kabupaten Bintan)*. Master Thesis, Universitas Indonesia. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/77283/2015mna.pdf>.
- Darwin. (2018). UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 26(1), 59-75. Diakses dari <http://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP/article/download/228/pdf>.
- Darwin. (2017). Dinamika UMKM dan Pembiayaan Mikro, dalam Saptia, Yeni, dan Nugroho, A.E. (2017) *Penguatan Program Kredit Mikro Dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Sektor Pertanian*. Diakses dari <https://lipipress.lipi.go.id>.
- Dewanti, I.S. (2010). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(2). Diakses dari https://www.academica.edu/35544548/1da_susi_Dewanti_naskah.
- Elisa R. & Zuhroh I. (2017). Peran Bank Thitil Dalam Kehidupan Masyarakat Ekonomi Lemah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-15. Diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id>.
- KKP. (2016). *KKP dan OJK Targetkan Kredit Sektor KP Rp. 9,2 Triliun*. Retrieved from <https://news.kkp.go.id>
- Masyuri. (2014). Pembiayaan Non-Formal Usaha Perikanan Tangkap: Kasus Muncar dan Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2). Diakses dari <http://jurnalekonomi.lipi.go.id/index.php/JEP/article/view/185/pdf>. doi: <http://dx.doi.org/10.14203/JEP.22.2.2014.135-148>.
- Mulyana. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-7). Jakarta: Rosda.
- Nasution. (2006). *Metode Riset Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neeley, L & Auken, H.V. (2010) dalam Caroline, V.P. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wirausaha Terhadap Penggunaan Bootstrap Financing. Diakses dari <http://eprints.perbanas.ac.id/776/1/ARTIKEL%20IMIAH.pdf>.
- Nazir. (2014). *Metode Deskriptif* (Cetakan ke-9). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Risnawati, N. (2018). Profil, UMK, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Coopetition*, 9(1), 13-29. Diakses dari <http://ikopin.ac.id/jurnal/index.php/cooption/article/download/44/45>.
- Sekretariat Negara RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Sutawi. (2008). Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Agribisnis Dengan Pola Kemitraan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(3), 447-458. Diakses dari <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/906/550>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/UU20Tahun2008UKM.pdf>.
- Wardono, B., Fauzi, A., Fahrudin, A., & Purnomo, A.H. (2015). Total Faktor Produktivitas dan Indeks Instabilitas Perikanan Tangkap: Kasus di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 35-36. doi: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i1.1246>.
- Winanto, A.R., & Rapini, T. (2014). Peran Lembaga Keuangan Informal Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Informal. *Jurnal Ekuilibrium*, 9(1), 1-9. doi: 10.24269/ekuilibrium.v9i1.42.
- Winarni, S. (2006). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan. *Jurnal Infokop*, 29(22), 92-98.
- Wiyono, E.S. & Mustaruddin. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Perikanan: Studi Kasus Pada Perikanan Tangkap Di Indramayu. *Jurnal Marine Fisheries*, 7(1), 109-115. Diakses dari <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsp/article/download/13539/10281>.